

---

---

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DALAM MENGGUNAKAN KEBUDAYAAN  
UNTUK MENINGKATKAN KERJASAMA INTERNASIONAL**

*THE STRATEGY OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION GOVERNMENT IN USING CULTURE  
TO ENHANCE INTERNATIONAL COOPERATION*

**FINTA KAULA PUTRI BAGESWARI**

**20130510004**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

---

**ABSTRACT**

This research is to explain how the strategy of Yogyakarta Special Region government in using culture to enhance international cooperation especially in sister city, tourism, and foreign direct investment. One enacted legislation autonomy trigger various regions in Indonesia are competing to build the region's potential. As the consideration, the most potential things that Yogyakarta Special Region have is cultural potential. This cultural potential is used as a tool of diplomacy for the Yogyakarta Special Region government in achieving local development through international cooperation. From the result of the research can be known that there are three strategies used by local government that are the strategy to make Yogyakarta Special Region cultural strategy plan, the strategy to enhance and to develop Yogyakarta Special Region culture through the promotion both in the country and abroad, and the strategy of foreign cooperation in education and cultural field.

**Keywords:** *Cultural Diplomacy, Strategy, Government*

---

---

## PENDAHULUAN

Masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena tidak ada kebudayaan yang tidak bertumbuh kembang dari suatu masyarakat. Sebaliknya tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan karena tanpa kebudayaan tidak mungkin masyarakat dapat bertahan hidup, masyarakat adalah wadah, dan budaya adalah isi. Terdapat hubungan timbal balik antara manusia dengan kebudayaan, yakni manusia menciptakan budaya kemudian budaya memberikan arah dalam hidup dan tingkah laku manusia. Kebudayaan merupakan hasil dari ide-ide dan gagasan –gagasan yang akhirnya mengakibatkan terjadinya aktivitas dan menghasilkan suatu karya (kebudayaan fisik) sehingga manusia pada hakekatnya disebut makhluk sosial.

Menurut Koentjaraningrat (1980) mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan dari hasil budi dan karya. Dengan kata lain kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Sedangkan menurut Kluckhohn dan Kelly, Kebudayaan adalah semua rancangan hidup yang tercipta secara historis, baik yang tersurat maupun yang tersirat, rasional, irasional yang ada pada suatu waktu sebagai pedoman yang potensial untuk perilaku manusia. Sementara itu E.B. Taylor mendefinisikan kebudayaan sebagai suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Menurut dimensi wujudnya, maka Kebudayaan mempunyai tiga wujud. Pertama, Wujud Sistem Budaya, bersifat abstrak, tidak bisa dilihat. Berupa kompleks gagasan, ide-ide, konsep, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada perilaku manusia serta perbuatannya dalam

masyarakat. Kedua, Wujud Sistem Sosial, bersifat konkret, dapat diamati atau di observasi. Berupa aktivitas manusia yang saling berinteraksi dan selalu mengikuti pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan yang ada dalam masyarakat seperti gotong-royong, kerjasama, musyawarah, dan sebagainya. Ketiga, Wujud Kebudayaan Fisik, merupakan aktivitas manusia yang saling berinteraksi tidak lepas dari berbagai penggunaan peralatan sebagai hasil karya manusia untuk mencapai tujuannya.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang unik, khas dan beragam. Provinsi dengan seribu julukan ini sering kali disebut sebagai pusat peradaban kebudayaan Jawa. Hal tersebut bukan tanpa alasan mengingat Kerajaan Mataram Kuno pertama kali didirikan di Yogyakarta yaitu pada tahun 1755. Maka tak heran bila Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekayaan potensi budaya yang khas dan beranekaragam.

Kebudayaan Yogyakarta dapat didefinisikan sebagai kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berakar dari kebudayaan lama dan asli serta sebagai hasil interaksi dari kebudayaan lain sebagai pelengkap, pemerkarya, dan penyempurna (DIY, 2010). Adapun potensi budaya yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi budaya yang bersifat *tangible* (fisik) terdiri dari kawasan cagar budaya, dan benda cagar budaya dan *intangible* (non fisik) seperti gagasan, sistem, nilai atau norma, karya seni, sistem sosial atau perilaku sosial yang ada dalam masyarakat.

Mengacu pada kekayaan potensi budaya, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tidak kurang dari 515 bangunan Cagar Budaya yang tersebar di 13 Kawasan Cagar Budaya. Keberadaan aset-aset budaya peninggalan peradaban tinggi masa lampau tersebut, dengan Kraton sebagai institusi warisan adiluhung yang masih terlestari keberadaannya, merupakan embrio, dan memberi spirit bagi tumbuhnya masyarakat dalam berkehidupan kebudayaan

terutama dalam berseni budaya, dan beradat tradisi. Selain itu, DIY juga mempunyai 107 prasarana budaya, 459 upacara adat, 4944 organisasi kesenian, 43 desa budaya dan 48 museum, yang dua diantaranya yaitu Museum Ullen Sentalu, dan Museum Sonobudoyo diproyeksikan menjadi museum internasional. (DIY, Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, 2017) Pada 2010, presentase benda cagar budaya tidak bergerak dalam kategori baik sebesar 41,55%, sedangkan kunjungan ke museum mencapai 6,42% (DIY P. P., 2010).

Kekayaan potensi budaya Yogyakarta ini juga tidak terlepas dari status keistimewaan Yogyakarta. Menurut UU Nomor 3 Tahun 1950 yang dikeluarkan oleh negara bagian Republik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta pada Maret 1950, keistimewaan DIY mengacu pada keistimewaan yang diberikan oleh UU Nomor 22 Tahun 1948 yaitu Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu pada zaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan, dan dengan mengingat adat istiadat di daerah itu.

Kekayaan potensi kebudayaan yang dimiliki Yogyakarta ini juga telah menarik minat negara-negara asing untuk melakukan kerjasama internasional. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari munculnya fenomena baru dalam hubungan internasional yang kini telah berubah seiring perkembangan zaman. Jika dahulu aktor yang paling dominan adalah negara, kini sekelompok manusia atau individu sekali pun dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan iklim di berbagai lini faktor kehidupan. Kemudian dari segi pola interaksi antar bangsa, dahulu untuk memperebutkan kekuatan hegemoni, suatu negara akan melakukan intervensi, invansi bahkan perang demi mewujudkan kepentingannya. Maka sebaliknya kini dunia lebih terasa damai seiring dengan adanya pola perubahan interaksi yang kini disebut sebagai kerjasama internasional.

Kerjasama pemerintah provinsi DIY merupakan kerjasama yang dilakukan oleh aktor non negara yaitu aktor yang merupakan bagian-bagian dari birokrasi pemerintah pusat bisa berupa pemerintah kota atau negara bagian, masyarakatpun juga dapat berinteraksi dengan masyarakat di negara lain. Organisasi pemerintah maupun non pemerintah dapat berhubungan secara langsung dengan masyarakat negara lain tanpa perantara pemerintah pusat. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa daerah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan, peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Maka dari itu berdasarkan landasan hukum diatas dan dengan kekayaan potensi kebudayaan yang dimiliki Yogyakarta, maka pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berusaha menerapkan strategi kebudayaan untuk menjalin hubungan internasional dalam konteks kerjasama internasional. Kerjasama internasional yang dimaksudkan dalam penelitian ini meliputi *sister city*, *tourism* dan investasi asing. Dalam konteks *sister city* misalnya, Yogyakarta telah menjalin hubungan dengan saudara kembarnya di beberapa kota di berbagai negara. Dua diantaranya sudah terjalin cukup lama lebih dari sepuluh tahun yaitu, prefektur Kyoto di Jepang dan prefektur Gyeongsangbuk-Do di Korea Selatan. Kedua pihak tersebut sepakat untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang. Kerjasama tersebut juga dilatar belakangi oleh kemiripan kebudayaan yang dimiliki.

## **KERANGKA KONSEP**

Menurut David Easton (1965) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *the impact of government activity* (Dwidjowijoto, 2006). Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970) mendefinisikan sebagai *a project program of goals, value, and practices*. R.Dye (1995) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *what government do, why they do it, and what*

*different it makes* (Dye, 1976). Berdasarkan definisi dari beberapa ahli tersebut maka dapat disimpulkan, kebijakan publik adalah segala bentuk aktifitas pemerintah untuk memutuskan suatu hal atau perkara yang bertujuan untuk mencapai tujuan masyarakat.

Dalam model kebijakan publik, dapat diamati adanya desakan atau tekanan dari lingkungan yang mana merupakan masukan atau input yang akan menghasilkan suatu kebijakan sekaligus dampak dari kebijakan tersebut. Dalam hal ini inputnya adalah tuntutan untuk mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan jawa di Yogyakarta agar tetap lestari dan untuk memperkaya khasanah budaya nasional.

Sedangkan outputnya adalah menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai pusat pendidikan, budaya, daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera seperti yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 sebagai arah kebijakan pembangunan yang berdampak pada perekonomian, sosial, maupun budaya. Hakikat kebudayaan jawa yang memuat kearifan, kejujuran, kesederhanaan, ramah-tamah, sopan santun dan sebagainya merupakan potensi penunjang dalam mewujudkan percepatan proses pembangunan yang baik di masa depan.

Adapun tingkat pembangunan dalam bidang kebudayaan jawa yaitu mencakup penguatan hak-hak berkebudayaan, penguatan jati diri, karakter dan multikultur, pelestarian nilai sejarah, dan warisan budaya, pengembangan kesenian dan industri budaya, penguatan diplomasi budaya, pengembangan pranata dan sumber daya manusia kebudayaan serta pengembangan sarana dan prasarana budaya (DIY D. K., Pembangunan Kebudayaan DIY di Era Keistimewaan, 2017). Dengan terpenuhinya ketujuh unsur tersebut maka untuk kedepannya diharapkan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menjalin kerjasama

internasional dengan negara asing maupun badan ataupun lembaga internasional lainnya dalam pengembangan kebudayaan jawa.

Selanjutnya adalah konsep diplomasi budaya adalah usaha suatu negara bangsa untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui kebudayaan secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian, dan olahraga. Atau bisa juga secara makro sesuai dengan ciri khas utama seperti propaganda dan lain-lain yang mengakaji kebudayaan lebih jauh dan lebih luas sampai dengan nilai-nilai nasionalisme, ideologi dan globalisasi (Kartikasari, 2007).

Diplomasi Kebudayaan ini merupakan salah satu dari sekian banyak jenis diplomasi yang dilakukan dalam melakukan hubungan internasional dimana suatu negara dapat memanfaatkan bidang kebudayaan untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain. Mengingat kebudayaan sekarang ini merupakan alat diplomasi yang cukup efektif dibandingkan jika menggunakan tindakan ancaman dan kekuatan yang justru akan menimbulkan dampak buruk seperti permusuhan dan perpecahan.

Diplomasi Kebudayaan yang digunakan pemerintah DIY sangat beragam yaitu mulai dari eksebis, kesenian, pertukaran misi, negosiasi dan konferensi. Dalam bentuk eksebis misalnya Jogja International Batik Biennale 2016, Jogja International Miniprint Biennale 2016, Jogja International Furniture and Craft Fair Indonesia 2017, dan Jogja Fashion Week. Dalam bentuk kesenian seperti Jogja International Street Performance, Jogja International Heritage Festival dan Promosi Kebudayaan DIY di Tiongkok dan Amerika Serikat. Dalam bentuk pertukaran misi adalah Student Cultural Program yang merupakan program pengenalan budaya Indonesia khususnya seni dan budaya Yogyakarta, dimana melibatkan 30 pelajar dari 15 negara Asia-Pasifik. Dan yang terakhir adalah negosiasi dan konferensi seperti, Symposium International IORA, International Symposium Jogja World Batik City, dan International Fishcrime Symposium.

Berdasarkan uraian singkat diatas kita bisa melihat bahwa kebudayaan Yogyakarta merupakan sesuatu yang khas yang kemudian menjadi suatu keistimewaan yang menarik banyak pihak. Beberapa langkah dan tindakan yang dilakukan pemerintahh DIY dalam uraian diatas juga menunjukkan bahwa pemerintah DIY memanfaatkan kebudayaan sebagai sarana atau media Diploması Kebudayaan yang efektif dimana didalamnya memuat unsur kesenian yang bertujuan untuk memperlihatkan kebudayaan dan keunggulan-keunggulan yang dimilikinya kepada masyarakat internasional

Konsep yang kedua adalah paradiplomasi, pertama kali muncul dalam perdebatan akademik oleh ilmuan asal Bosque, Panayotis Soldatus tahun 1980an sebagai penggabungan istilah “parallel diplomacy” menjadi “paradiplomacy” yang mengacu pada makna “the foreign policy of non-central government” menurut Aldecoa, Keating dan Boyer. Istilah lain yang pernah dilontarkan oleh Ivo Duchacek (New York, tahun 1990) untuk konsep ini adalah “micro-diplomacy” (Crikemas, 2008).

Kerjasama pemerintah provinsi DIY merupakan kerjasama yang dilakukan oleh aktor non negara yaitu aktor yang merupakan bagian-bagian dari birokrasi pemerintah pusat bisa berupa pemerintah kota atau negara bagian dapat berinteraksi dengan masyarakat di negara lain. Organisasi pemerintah maupun non pemerintah dapat berhubungan secara langsung dengan masyarakat negara lain tanpa perantara pemerintah pusat. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa daerah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan, peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, pola hubungan internasional diatas akan kita korelasikan dengan contoh kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dalam bidang *sister city*, *tourism*, dan investasi asing. Aktor-aktor yang terlibat dalam contoh kasus ini diantaranya adalah pemerintah DIY dengan Prefektur Kyoto



dan Gyeongangbuk-do. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa Pemerintah Pusat berperan sebagai GI dalam pola interaksi yang kemudian dilanjutkan ke Pemerintah DIY yang berkedudukan sebagai *Local Government* (LG) dan kemudian terjadi lah interaksi antar pemerintah *G to G* (*Government to Government*) diantara keduanya.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **MEMBUAT RENCANA STRATEGI PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DIY**

Penyusunan Rencana Strategi Pembangunan Kebudayaan DIY didasarkan pada pembuatan kebijakan Rencana Pembanguna Daerah Jangka Panjang (RPDJP) DIY tahun 2005-2005. Salah satu visi dalam RPDJP menyebutkan DIY akan menjadi pusat kebudayaan di Asia Tenggara pada tahun 2025. Maka dari itu untuk mencapainya pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan DIY menyusun Rencana Strategi Pembanguna Kebudayaan DIY. Visi dari Pembangunan Kebudayaan DIY sampai dengan tahun 2025 adalah terwujudnya kondisi kehidupan berkebudayaan yang mendukung tercapainya sebagai pusat budaya, pusat pendidikan, dan tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan yang maju, mandiri, dan sejahtera pada tahun 2025

Mendasarkan pada Visi Pembangunan Kebudayaan DIY maka penjabaran misi dari Pembangunan Kebudayaan DIY yang juga memuat arah kebijakan, strategi dan indikasi progam per aspek pembangunan kebudayaan DIY sampai dengan tahun 2025 akan dilakukan dengan mewujudkan “**YOGYAKARTA CULTURE CENTRE**” sebagai sarana pokok untuk mengembangkan dan menjadikan DIY sebagai “***Ibukota Kebudayaan Indonesia***” (DIY D. K., Penyusunan Cetak Biru Pembangunan Kebudayaan Tahun 2014. , 2012). Ranah cangkupan pengembangan “Yogyakarta Culture Centre” ini akan meliputi dua aspek pembangunan utama, yang pertama aspek pengembangan makro berfokus pada

pengembangan pusat-pusat “Budaya Yogyakarta” baik di tingkat provinsi maupun di 5 kabupaten/kota di Yogyakarta yang akan berfungsi sebagai inkubator kreativitas berbasis budaya dan yang kedua aspek pengembangan mikro yang berfokus pada pengembangan segenap kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kebudayaan DIY yang merupakan serangkaian misi dari Pembangunan Kebudayaan DIY sampai dengan tahun 2025 yaitu dengan penguatan hak-hak berkebudayaan, penguatan jati diri, karakter dan multikultur, pelestarian nilai sejarah, dan warisan budaya, pengembangan kesenian dan industri budaya, penguatan diplomasi budaya, pengembangan prana dan sumber daya manusia kebudayaan serta pengembangan sarana dan prasarana budaya (DIY D. K., Pembangunan Kebudayaan DIY di Era Keistimewaan, 2017).

#### MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN KEBUDAYAAN DIY MELALUI PROMOSI BAIK DALAM NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI

Budaya khas DIY merupakan asset yang sangat berguna dalam melakukan diplomasi budaya, baik dalam lingkup nasional hingga internasional. Selain memperkenalkan dan mempromosikan kebudayaan D.I. Yogyakarta, melalui kegiatan diplomasi budaya juga dapat meningkatkan pengakuan dan penghormatan dunia internasional terhadap harkat, martabat, dan peran bangsa dan negara, melalui hubungan berbasis bilateral maupun multilateral dalam bidang kebudayaan. Selain itu, diplomasi kebudayaan dapat menjadi alat untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian dunia (DIY D. K., Pembangunan Kebudayaan DIY di Era Keistimewaan, 2017).

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara aktif memanfaatkan potensi kekayaan budaya DIY yang khas, unik dan beragam melalui diplomasi budaya yang dilakukan terus menerus untuk lebih mengenalkan kebudayaan lokal yang juga sering disebut-sebut sebagai kebudayaan nasional bangsa Indonesia di luar negeri. Agenda promosi

melalui kegiatan diplomasi budaya ini kemudian disebut sebagai bagian dari program Misi Kebudayaan yang di ampu oleh Dinas Kebudayaan DIY yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai dengan tahun 2017 dan terhitung sejak tahun 2010 tercatat sejumlah 33 misi kebudayaan yang di lakukan oleh pemerintah daerah DIY dan dinas kebudayaan DIY yang berbentuk eksebisi, negosiasi, kesenian, konferensi dan pertukaran misi.

Seiring peningkatan yang promosi kebudayaan tersebut, terjadi pula peningkatan dalam sektor pariwisata dimana jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara mengalami peningkatan terus menerus setiap tahunnya. Terjadinya peningkatan ini dibarengi dengan peningkatan jumlah permintaan jasa akomodasi pariwisata yaitu hotel berbintang dan non berbintang sebagai hunian sementara wisatawan yang mengunjungi Yogyakarta. Dalam keadaan demikian, munculah peluang bagi para investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di sektor unggulan DIY yaitu pariwisata khususnya dalam bidang perhotelan.

**Tabel Penanaman Modal Sektor Pariwisata Tahun 2013**

No	Sektor	PMDN	PMA
1	Perdagangan	13.696.245.000	1.580.971.004.656
2	Perhotelan & Restoran	1.191.571.540.000	1.116.098.976.710
Jumlah		<b>1.205.267.785.000</b>	<b>2.697.069.981.336</b>

(Sumber: BKPM DIY)

Jika dilihat dari investasi asing persektor, bidang akomodasi atau perhotelan memiliki jumlah angka tertinggi dalam penanaman modal. Hal ini terjadi karena banyaknya jaringan hotel management yang menanamkan modalnya di Yogyakarta. Contoh beberapa jaringan hotel internasional yang menanamkan modalnya dalam sektor ini adalah Accor (Perancis), Aston Internasional (Amerika Serikat), Tauzia Management (Perancis), Melia Hotel Internasional, dan Swiss-Belhotel (Hong Kong).

Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan dan pengembangan kebudayaan DIY melalui promosi baik dalam maupun luar negeri telah menghasilkan *multiplier effect* di segala bidang sektor pembangunan DIY. Dalam konteks eksternal, peningkatan tersebut juga diiringi dengan peningkatan intensitas hubungan internasional baik yang dilakukan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini membuktikan bahwa dengan kekayaan potensi budayanya dan menerapkan strategi kebudayaan melalui diplomasi budaya yang dikemas dalam misi kebudayaan untuk tujuan promosi dapat mewujudkan arah pembangunan daerah yang berkemajuan.

#### MELAKUKAN KERJASAMA LUAR NEGERI DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Adanya beberapa peraturan dan keputusan yang mengatur jalannya hubungan dan kerjasama luar negeri telah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun ditingkat kota dan kabupaten untuk melakukan hubungan luar negeri atau kerjasama internasional terhadap mitra yang ada di luar negeri (Zenita, 2014). Disamping sebagai pelengkap dalam pembangunan daerah, kerjasama internasional ini merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi dan berbagai keunggulan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Yogyakarta sebagai miniatur kebudayaan Indonesia, menyimpan sejuta potensi kebudayaan yang khas, unik dan beragam. Potensi kebudayaan yang dimiliki DIY pun bukan lagi dikenal di kalangan bangsa Indonesia saja melainkan juga oleh bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia. Maka dengan potensi tersebut, pemerintah DIY terus melakukan upaya dan strategi guna mengembangkan dan menjadikan Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan yaitu dengan melakukan hubungan dengan pihak luar negeri dalam bingkai kerjasama internasional khususnya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

Hal ini bertujuan untuk mencapai keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Peningkatan kerjasama antara pemerintah DIY dengan pihak luar negeri salah satunya berupa pembentukan perjanjian kerjasama. Pemerintah DIY melakukan upaya penjajakan kerjasama dengan daerah lain yang berada di luar negeri yang bersifat *G to G (Government to Government)* dengan memanfaatkan koneksi dan jaringan yang ada. Model hubungan kerjasama luar negeri ini kemudian disebut dengan kota kembar atau *Sister City*

Hubungan luar negeri pemerintah provinsi DIY yang tercatat dan masih aktif telah berlangsung sejak tahun 1985 berjumlah 13 perjanjian kerjasama luar negeri. Salah satunya yang telah berlangsung lama dan masih terjalin dengan baik hingga sekarang adalah hubungan pemerintah DIY dengan prefektur Kyoto Jepang. Perjanjian kerjasama luar negeri yang dijalin dengan 13 negara tersebut pada umumnya berfokus pada bidang kebudayaan dan pendidikan. Masing-masing pemerintah menyusun program unggulan di kedua bidang tersebut untuk pencapaian pembangunan masing-masing daerah.

## **KESIMPULAN**

Sebagai aktor politik pemerintah membuat strategi dalam membangun daerahnya dengan mempertimbangkan keunggulan dan potensi daerah yang dimiliki. Strategi tersebut dapat berupa suatu regulasi maupun tindakan.. Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun rencana strategi untuk mencapai pembangunan daerah yang diharapkan. Kaitanya dengan keunggulan dan potensi yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta memiliki kekayaan potensi budaya adat tradisi yang khas, unik dan beragam yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram.

Potensi kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta ini kemudian dijadikan sebagai landasan berideologi dan bertindak oleh seluruh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri juga telah menjadikan kebudayaan sebagai acuan dasar pembangunan daerah yang menjadi payung bagi semua sektor pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Disamping itu Visi DIY 2025 yang ingin menjadikan Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan, pendidikan dan pariwisata terkemuka di Asia Tenggara mencerminkan cita-cita masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih terus memegang teguh, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta di dunia internasional.

Strategi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menggunakan kebudayaan untuk meningkatkan kerjasama luar negeri (*sister city, tourism dan investasi asing*) adalah membuat rencana strategi pembangunan kebudayaan DIY, meningkatkan dan mengembangkan kebudayaan DIY melalui promosi baik dalam negeri maupun luar negeri, dan melakukan kerjasama luar negeri dalam bidang pendidikan dan kebudayaan

Dari penerapan hasil strategi kebudayaan yang dilakukan pemerintah dapat dilihat hasil yang positif dimana terjadi peningkatan intensitas kerjasama internasional dengan memanfaatkan kebudayaan sebagai alat diplomasi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan adanya peningkatan ini maka pemerintah dinilai cukup berhasil dalam menerapkan strategi kebudayaan tersebut. Untuk kedepannya diharapkan pembangunan daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan dengan baik dan berkemajuan dan n mencapai Visi DIY 2025.

## DAFTAR PUSTAKA

Criekemas, D. (2008). *Are The Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Wtering Down?* Belgum: University of Anwerp and Flemish Centre for International Policy .

DIY, D. K. (2010). *Dinas Kebudayaan Provinsi DIY*. Retrieved Januari 7, 2017, from Dinas Kebudayaan Provinsi DIY: <http://www.tasteofjoga.com>

DIY, D. K. (2017). *Dinas Kebudayaan Provinsi DIY*. Retrieved Januari 20, 2017, from Kebudayaan Yogyakarta: [http://www.tasteofjogja.org/resources/artikel/223/KEBIJAKAN\\_PEMBANGUNAN\\_KEBU DAYAAN\\_PROVINSI\\_DAER.pdf](http://www.tasteofjogja.org/resources/artikel/223/KEBIJAKAN_PEMBANGUNAN_KEBU DAYAAN_PROVINSI_DAER.pdf)

DIY, D. K. (2017). *Pembangunan Kebudayaan DIY di Era Keistimewaan*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan DIY.

DIY, D. K. (2012). *Penyusunan Cetak Biru Pembangunan Kebudayaan Tahun 2014*. . Yogyakarta: Dinas Kebudayaan DIY.

DIY, P. P. (2010). *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi DIY*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Pemerintah Provinsi.

Dwidjowijoto, R. N. (2006). *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Dye, T. (1976). *What Government do, why they do it, what difference it makes*. Tuscaloosa: University Alabama Press.

Kartikasari, T. W. (2007). *Diplomasi Kebudayaan, Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang Studi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.

Zenita, R. S. (2014). Dikutip dari Rizqi Sandra Zenita Strategi Kerjasama Luar Negeri Pemerintah DIY Meningkatkan Arus Kunjungan Wisatawan Asing (2010-2013). *Skripsi* , 56.